



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Aswanto**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **405598**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/225 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/211 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/100 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/5 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.710.000.000

1. MOBIL, Mercedes Benz Sedan Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, Daihatsu Terios Minibus Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, Honda CRV Jeep Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



750.000.000

6. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

600.000.000

7. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

2.385.281.609

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

12.195.281.609

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

12.195.281.609

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.